

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Media memerankan peran penting dalam membentuk dan menjaga memori kolektif, terutama dalam menyampaikan narasi sejarah yang kabur dari narasi arus utama. Hal ini biasanya muncul pada momen-momen peringatan atau komemorasi. Namun, kemunculan berita yang hanya ada pada momen komemorasi dikritik oleh Jackson (2021) sebagai pengabaian paliatif, sebuah kegagalan dalam mengeksplorasi pengertian mendalam tentang masa sekarang yang dikarenakan masa lalu. Padahal, membangun konstruksi sejarah yang utuh sangat penting karena akan memengaruhi cara individu memahami dan menilai peristiwa-peristiwa di masa kini (Neiger, 2020, p. 3). Sebab, pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejarah dapat memengaruhi evaluasi politik masyarakat terhadap kondisi saat ini (Schuman & Corning dalam Kligler-Vilenchik et al., 2014, p. 496).

Jika bicara soal memori media, hubungan antara memori dan jurnalisme dapat dipandang sebagai simbiosis mutualisme. Menurut Zelizer (2008), keduanya saling membutuhkan: jurnalisme memerlukan memori untuk menuturkan kembali peristiwa-peristiwa publik, sementara memori memerlukan jurnalisme untuk menyebarkan narasi-narasi peristiwa masa lalu ke khalayak luas. Namun, pemilihan berita yang mengandalkan momen komemorasi untuk menghidupkan kembali sejarah, seperti dikritik oleh Jackson (2021), mereduksi nilai dari hubungan timbal balik ini. Bagi Jackson (2021), pendekatan tersebut tidak cukup untuk membangun pemahaman yang mendalam dan terus-menerus tentang relasi antara masa lalu dan masa kini, sebagaimana fungsi esensial dari memori. Penggunaan sejarah yang hanya fokus pada peringatan tahunan membuat memori kolektif sekadar menjadi aksesoris tanpa eksplorasi makna yang mendalam.

Sejumlah negara telah menerapkan pemaknaan terhadap memori kolektif dari tragedi yang menimpa negaranya. Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat. Mitchell (2003) menggambarkan bagaimana Presiden Amerika Serikat ke-43, George Bush menggelar peringatan megah untuk memperingati setahun serangan teroris 9/11. Momen tersebut menghadirkan tiga kapal berisikan lampu besar untuk menerangi Patung Liberty, serta pidato bernuansa patriotik dan nasionalis. Mitchell berpendapat bahwa peringatan tersebut bukan sekadar pidato seremonial, melainkan aksi politik yang membentuk makna masa depan dari memori kolektif, dengan pendekatan yang estetik dan spektakuler.

Jerman juga menerapkan pemaknaan terhadap memori kolektif dari tragedi yang menimpa negaranya melalui pembangunan Memorial to the Murdered Jews of Europe di Berlin. Menurut Neumärker, tempat ini memiliki pusat informasi bawah tanah yang dirancang untuk mempersonalisasi pengalaman korban Holocaust. Selain berfungsi sebagai pengingat, memorial ini juga menjadi subjek diskusi yang berkelanjutan mengenai cara mengenang kejahatan Nazi, serta menghormati para korban, baik Yahudi maupun non-Yahudi (Neumärker, 2012, p. 146).

Sementara itu, Kamboja mengabadikan memori kolektif genosida yang terjadi pada masa pemerintahan Khmer Merah melalui pendirian Tuol Sleng Genocide Museum di Phnom Penh. Menurut Brown & Millington, museum tersebut sebelumnya merupakan penjara S-21, pusat interogasi dan penyiksaan utama pada rezim Pol Pot. Museum ini berfungsi untuk mendokumentasikan kejahatan genosida Khmer Merah dan menjadi bagian dari konstruksi memori kolektif nasional Kamboja (Brown & Millington, 2015, p. 32). Di akhir tur, pengunjung diingatkan tentang pentingnya mengenang tragedi ini dengan pesan: memori genosida harus menjadi bagian dari refleksi untuk masa depan (Brown & Millington, 2015, p. 36).

Indonesia juga memiliki memori kolektif atas peristiwa dalam sejarahnya. Peristiwa pembantaian massal pada 1965, misalnya, perlu dirawat memorinya lantaran telah menyebabkan lebih dari 500.000 kematian, tahanan politik, dan stigma yang dialami para korban (Marching dalam Ikhwan et al., 2019, p. 3).

Namun, pemerintah belum pernah mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada para korban.

Narasi peristiwa 1965 juga menjadi polemik karena narasi utama yang berkembang masih didominasi oleh versi sejarah Orde Baru (Ikhwan et al., 2019, p. 4). Dominasinya dapat dilihat melalui film *Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI* yang diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) dengan biaya produksi sebesar 800 juta rupiah pada 1984. Sebagai kepala PPFN kala itu, Gufran Dwipayana mengatakan bahwa film ini akan membuat generasi muda saat itu tidak tergoa dan berpihak pada ideologi komunis (Taum, 2015, p. 170). Heeren (2012) juga mencatat bahwa film tersebut wajib ditayangkan setiap 30 September, serta disematkan dalam kurikulum pendidikan sejarah. Fakta ini mencerminkan bagaimana media digunakan sebagai alat penting dalam menyebarkan propaganda.

Penayangan wajib film *Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI* dan penyematannya dalam kurikulum sejarah menunjukkan bagaimana media digunakan untuk mengontrol ideologi. Dengan cara ini, media membentuk memori kolektif sesuai kepentingan rezim. Saat narasi resmi tidak membanggakan atau mengandung elemen trauma, media pun menjadi alat utama dalam membentuk persepsi publik (Peri, 1999, p. 107).

Sebagai agen yang menarasikan memori kolektif, media bertanggung jawab dalam menentukan makna yang terkandung dalam kontennya (Zanynu, 2018, p. 22). Neiger (2020) menegaskan bahwa media berfungsi sebagai sutradara dalam ranah sosial-politik, menentukan siapa yang layak tampil dalam narasi, berapa lama mereka dibahas, dan bagaimana cara suatu narasi disajikan. Sayangnya, peran ini kerap kali terhambat ketika makna memori kolektif justru tereduksi akibat narasi yang hanya diangkat pada momen-momen komemorasi tertentu. Dalam hal ini, kebijakan redaksi menjadi elemen kunci untuk menentukan apakah media memperkuat atau justru melemahkan keragaman makna memori kolektif.

Oleh karena itu, analisis mendalam tentang produksi konten memori media, yang tercermin melalui kebijakan redaksi, menjadi penting untuk ditelisik.

Sebab, upaya tersebut bisa menambah pemahaman tentang kecenderungan media dalam penyajian informasi sejarah (Zanynu, 2018, p. 31). Proses pembingkai berita yang dilakukan media menentukan apakah makna memori kolektif dipertahankan, diperluas, atau malah direduksi. Karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah studi sebelumnya terkait peran media sebagai agen memori.

Secara khusus, penelitian ini berfokus pada *Majalah Tempo* dan *Historia.id*, dua media yang memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa 1965 dan menawarkan perspektif mendalam dalam pemberitaannya. *Majalah Tempo* memiliki peran unik dalam mengangkat isu 1965 karena kerap membuat liputan khusus terkait peristiwa 1965 pada momen peringatan G30S. Salah satu liputannya, ‘Pengakuan Algojo 1965’, muncul setelah film ‘Jagal’ dan menawarkan inisiatif untuk rekonsiliasi nasional serta pembentukan pengadilan *ad hoc* sebagai langkah penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi pada 1965. Namun, muncul pertanyaan apakah liputan ini benar-benar mencerminkan upaya untuk menyuarakan memori kolektif secara konsisten atau hanya bersifat reaktif setelah kemunculan film ‘Jagal’ yang membahas tragedi 1965. Sementara itu, *Historia.id*, sebagai media sejarah populer, memiliki fokus yang lebih mendalam dalam merekonstruksi bagian-bagian sejarah yang terlupakan. Media tersebut mengombinasikan prinsip jurnalistik dengan penelitian sejarah yang mendalam, menghasilkan narasi yang edukatif (“Tentang Kami,” n.d.). Kepedulian *Historia.id* dalam merawat memori kolektif terbukti melalui liputan peristiwa 1965 yang tidak hanya dipublikasikan saat momen komemorasi 30 September, tetapi juga di hari-hari lain, seperti artikel “Peristiwa G30S di Kota Salatiga” (9 Juni 2021), “Dramaturgi Utuy Tatang Sontani” (29 April 2021), dan “Soetarni Ditahan bersama Tujuh Anaknya” (24 Agustus 2022). Dengan memilih kedua media ini, penulis dapat memperoleh wawasan yang saling melengkapi karena perbedaan pendekatan yang digunakan oleh kedua media dalam menuliskan soal peristiwa 1965.

Melalui analisis kebijakan redaksi *Majalah Tempo* dan *Historia.id*, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana dan mengapa keputusan editorial

dibuat, serta dampaknya dalam membentuk dan mempertahankan memori kolektif peristiwa 1965. Sebab, dalam menentukan topik liputan dan narasumber, wartawan cenderung mengikuti editor yang berkiblat pada orientasi media (Milojević, & Krstić, 2018, p. 10). Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan editorial dipengaruhi oleh struktur organisasi media, dan orientasi politik, serta ekonomi pemiliknya yang tercermin dalam kebijakan redaksi (Milojević & Krstić, 2018, p. 11). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang peran media dalam menjaga dan membentuk memori bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan redaksi Majalah Tempo dan Historia.id memengaruhi konstruksi makna peristiwa 1965 dalam liputan mereka?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja kebijakan redaksi yang diterapkan oleh Majalah Tempo dalam meliput peristiwa 1965?
2. Apa saja kebijakan redaksi yang diterapkan oleh Historia.id dalam meliput peristiwa 1965?
3. Bagaimana kebijakan redaksi Majalah Tempo memengaruhi narasi dan sudut pandang yang ditampilkan dalam liputan peristiwa 1965?
4. Bagaimana kebijakan redaksi Historia.id memengaruhi narasi dan sudut pandang yang ditampilkan dalam liputan peristiwa 1965?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan redaksi yang diterapkan oleh Majalah Tempo dalam meliput peristiwa 1965.
2. Untuk mengetahui kebijakan redaksi yang diterapkan oleh Historia.id dalam meliput peristiwa 1965.
3. Untuk mengetahui kebijakan redaksi *Majalah Tempo* yang memengaruhi narasi dan sudut pandang yang ditampilkan dalam liputan peristiwa 1965.

4. Untuk mengetahui kebijakan redaksi Historia.id yang memengaruhi narasi dan sudut pandang yang ditampilkan dalam liputan peristiwa 1965.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Signifikansi akademis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengisi celah penelitian terkait memori media dan liputan peristiwa 1965, khususnya dalam konteks produksi konten yang berakar dari kebijakan redaksi suatu media. Dengan fokus pada dua media yang aktif mengkonstruksi narasi sejarah 1965, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana memori kolektif dibentuk melalui praktik editorial. Penelitian ini juga berkontribusi dalam ranah studi memori media di Indonesia yang masih minim dieksplorasi, khususnya dalam konteks jurnal akademis berbahasa Indonesia.

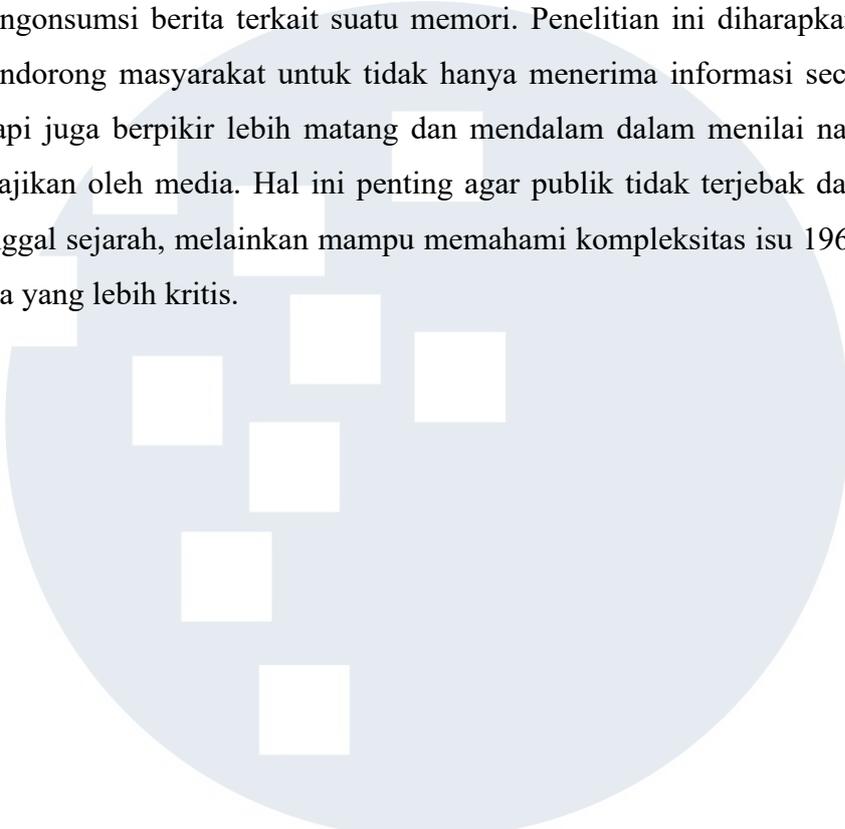
1.5.2 Kegunaan Praktis

Bagi media, penelitian ini dapat dijadikan panduan dalam merumuskan kebijakan redaksi yang lebih sesuai untuk liputan peristiwa 1965. Temuan-temuan yang dihasilkan akan membantu media dalam memproduksi konten yang lebih berimbang dan komprehensif, mengisi kekosongan dalam narasi sejarah yang sering kali terfragmentasi. Dengan demikian, media dapat saling melengkapi potongan-potongan "*puzzle*" sejarah yang selama ini hilang, sehingga keseluruhan liputan tentang peristiwa 1965 dalam media di Indonesia menjadi lebih utuh dan mendalam.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Kegunaan sosial penelitian ini adalah memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat mengenai bagaimana media mengangkat isu-isu masa lalu, khususnya peristiwa 1965. Dengan memahami bagaimana kebijakan redaksi

memengaruhi penyajian informasi, masyarakat bisa lebih kritis dalam mengonsumsi berita terkait suatu memori. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berpikir lebih matang dan mendalam dalam menilai narasi yang disajikan oleh media. Hal ini penting agar publik tidak terjebak dalam versi tunggal sejarah, melainkan mampu memahami kompleksitas isu 1965 dengan cara yang lebih kritis.

A large, light blue watermark logo of Universitas Multimedia Nusantara (UMMN) is centered on the page. It features a stylized 'U' with a grid of squares inside, and the letters 'M', 'M', and 'N' to its right.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA